

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran UMKM dalam kemajuan serta pembangunan ekonomi di Indonesia dinilai penting. Sektor UMKM di Indonesia mempunyai kontribusi yang tinggi dan krusial. Saat ini pemerintah tengah berfokus menata pembangunan yang tersedia di Indonesia. Kemajuan pembangunan di Indonesia terjadi pada bidang industri serta bidang ekonomi. Perusahaan besar atau kecil mempunyai peranan dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia, selain itu UMKM juga membantu dunia ekonomi dan industri dalam memajukan serta mengembangkan usaha dalam negeri (Putra, 2018).

Perusahaan adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperoleh manfaat. Pengelolaannya dilakukan oleh sekelompok orang, yang masing-masing mengemban tanggung jawab menurut klasifikasi fungsional, mulai dari manajer hingga karyawan operasional (Purnamawati & Yuniarta, 2016). Perusahaan perseorangan merupakan suatu perusahaan yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh suatu laba yang dilakukan oleh satu orang (Raharjo, 2012). Pesatnya perkembangan dunia usaha menyebabkan tingkat persaingan antarperusahaan semakin meningkat (Purnamawati, 2019). Perkembangan bisnis yang semakin kuat telah melahirkan banyak perusahaan dari berbagai dunia, termasuk UMKM yang peranannya cukup tinggi sehingga hal tersebut terbukti karena UMKM telah memberikan kontribusi kepada PDB (produk domestik bruto), UMKM juga

menarik total kerja 89,2%, menyediakan 99% lapangan kerja, menyumbang 14,17% dari penjualan ekspor dan total investasi 58,18% (Kompas, 2019).

UMKM adalah jenis aktivitas bisnis yang bisa memperluas kesempatan kerja, menaruh pelayanan ekonomi yang komprehensif, berperan pada proses yang adil, menaikkan stabilitas nasional, mendorong bertumbuhnya perekonomian dan menaikkan pendapatan masyarakat (Weya et al., 2020). Sektor UMKM yang ada meliputi sektor komersial, sektor industri pengolahan, pertanian, hortikultura, peternakan, sektor perikanan dan sektor jasa. Bentuk dan upaya pemerintah untuk menyangga ekonomi rakyat kecil di Indonesia yaitu dengan memberikan perhatian yang lebih tinggi bagi para pelaku usaha. Kehidupan masyarakat di wilayah bawah diberikan dampak secara langsung oleh UMKM (Dewi dan Martadinata, 2018).

Sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku usaha seringkali menemui dan menghadapi kesulitan maupun kendala yang menyebabkan keberlangsungan suatu usaha terhambat. Perkembangan suatu usaha tentu memerlukan tambahan dana yang besar. Kenyataannya dari fenomena yang ada sebagian besar UMKM menggunakan modal pribadi atas usaha yang dijalankan serta tidak adanya pemisahan dari uang pribadi dan uang yang digunakan dalam menjalankan usahanya. Pengelolaan dana dalam suatu usaha menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM (Savitri & Saifudin, 2018). Kunci keberhasilan dan kegagalan suatu usaha tergantung dari cara mengelola dana. Pengelolaan dana yang baik dapat diterapkan pada pelaporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan memegang peranan penting dalam mencapai kesuksesan usaha (Istanti et al., 2020).

Laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan keadaan perusahaan karena laporan keuangan adalah dasar untuk keputusan bisnis, yang diharapkan dapat membantu pengguna membuat keputusan keuangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan tugas bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya sendiri dan dapat memperoleh informasi yang diperlukan dari laporan keuangan yang dihasilkan (Darmayanti et al., 2017). Selain itu laporan keuangan bermanfaat untuk melihat bagaimana posisi keuangan di setiap bulannya dan laporan keuangan akan mampu mempermudah dalam pengambilan keputusan serta mempermudah dalam pengajuan peminjaman modal di bank atau penyedia dana lainnya.

Fenomena yang ada yaitu sebagian besar UMKM tidak melakukan pembukuan padahal beberapa regulasi telah mendorong serta mewajibkan agar UMKM menyusun laporan keuangan (Wiratno et al., 2019). Kenyataannya penyusunan laporan keuangan masih sangat rendah di kalangan UMKM. Berdasarkan sumber berita yang telah dilansir dari Tribun-Bali (2018) yang menyatakan bahwa pembukuan UMKM di Bali belum baik. Berkaitan dengan fenomena tersebut, pembukuan laporan keuangan UMKM dipermudah dengan adanya Ikatan Akuntan Indonesia yang telah menerbitkan serta mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM berlaku sejak 1 Januari 2018. SAK EMKM ini bertujuan menstandarisasi laporan keuangan UMKM yang mana tidak seluruh pelaku usaha dapat mengimplementasikan Standar Akuntansi yang diterapkan sebelumnya yang mana Standar Akuntansi tersebut dianggap rumit bagi pelaku UMKM yaitu SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). SAK

ETAP sebagai standar yang ditargetkan untuk perusahaan kecil dan menengah diluncurkan pada 17 Juli 2009 (Purnamawati, 2020). Perbedaan SAK ETAP serta SAK EMKM ialah SAK EMKM dipergunakan oleh entitas yang hampir tidak mengandung akuntabilitas publik. Hal ini sejalan dengan definisi dan karakteristik EMKM dalam regulasi UMKM di Indonesia (Suastini et al., 2018). Persetujuan SAK EMKM seharusnya membantu perusahaan mengubah informasi keuangan berbasis likuiditas menjadi informasi keuangan berbasis akrual. SAK dibagi menjadi tiga bagian: neraca, laporan laba rugi, serta CaLK, yang dasarnya hanya biaya perolehan. Pergantian SAK ETAP menjadi SAK EMKM dikarenakan pelaku umkm sebagian besar belum mempunyai kemampuan untuk melakukan pembuatan laporan keuangan sesuai SAK ETAP, padahal untuk mengakses modal atau meminjam tambahan modal memerlukan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK. Meskipun SAK EMKM yang terbilang sederhana, SAK EMKM juga mampu memberikan suatu informasi yang akurat dalam menyajikan pelaporan keuangan.

Pelaku UMKM tidak mudah menyetujui keberadaan SAK EMKM. Karena, seperti yang kita ketahui sebagian besar eksekutif ekonomi tidak membuat laporan keuangan berlandaskan SAK. Hal tersebut terjadi akibat beberapa hal seperti masih rendahnya pendidikan, pelaku UMKM kurang memahami dan mengetahui serta kurang terampilnya pelaku usaha dalam bidang akuntansi, adanya pemikiran bahwa pembukuan rumit serta kurangnya tenaga ahli yang mampu menyusun pembukuan yang sesuai. Sebagian besar pelaku UMKM mempunyai pemikiran bahwa saat proses menyusun pembukuan itu sangat sulit, rumit dan pencatatan dirasa tidak dibutuhkan oleh pelaku UMKM (Soraya &

Amir, 2016). UMKM menghadapi empat tantangan utama di Indonesia. Pertama masalah pelaporan keuangan, kedua masalah akses permodalan, ketiga masalah keterampilan belajar dan terakhir masalah pemasaran produk dan jasa kecil menengah (Putri et al., 2015).

Bersumber dari observasi awal yang dilaksanakan kepada Toko Ayudia dengan jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan yang ada di wilayah Kecamatan Banjar, ternyata pemilik usaha hanya membuat pencatatan status keuangan sederhana, yaitu berapa banyak uang tunai yang masuk dan keluar dari usahanya. Pencatatan sederhana tersebut disebabkan karena pemilik usaha menganggap bahwa proses penyusunan laporan keuangan itu sulit dan rumit, hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan dari pemilik usaha sehingga kurang memiliki pemahaman mengenai proses pencatatan laporan keuangan sesuai SAK. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh pemilik usaha Toko Anita dengan jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan yang ada di wilayah Kecamatan Banjar mendapatkan hasil bahwa pemilik usaha juga hanya mencatat keuangan dengan model sederhana dan tidak sistematis, sehingga pencatatan disusun sesuai dengan apa yang dipahami oleh pemilik usaha seperti mencatat pendapatan dan beban-beban terhadap aktivitas operasi usahanya.

Teori yang dipergunakan pada riset ini pada awalnya ialah teori perilaku terencana, yaitu sikap seseorang yang berkembang sebagai akibat adanya niat. Oleh karena itu, niat berperilaku seseorang dapat disimpulkan dari tiga faktor: *pertama* sikap terhadap perilaku, *kedua* norma subjektif dan *ketiga* persepsi kontrol diri. Salah satu prediktor niat dalam teori perilaku terencana adalah persepsi kontrol diri yang dirasakan, terutama keyakinan bahwa seseorang

bertindak berdasarkan kemampuan sendiri. Keyakinan diperoleh dari pengalaman terdahulu seseorang yang berkaitan dengan perilaku yang dapat meningkatkan atau menurunkan sikap seseorang tentang seberapa mudah dan sulitnya melakukan suatu perilaku. *Theory of Planed Behavior* ini diaplikasikan untuk memperkuat variable tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi. Pemilik termotivasi untuk menerapkan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM jika pemangku kepentingan UMKM yakin bahwa mereka memiliki pendidikan dan pemahaman akuntansi yang memadai.

Teori kedua adalah *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT), yang dilandaskan dari niat pengguna teknologi informasi, empat penentu dasar dan empat faktor utama yang mengatur sistem terkait. Ini mendukung faktor pertama, harapan kinerja, yang kedua harapan usaha, ketiga dampak sosial dan keempat kondisi. Salah satu determinan dasar tersebut adalah adanya kondisi pendukung. Artinya harus ada infrastruktur dan teknik untuk mendukung penggunaan sistem (Aini, 2017). Karena ukuran usaha merupakan pengalaman perusahaan yang digunakan untuk menjalankan usaha dari total asset yang dimiliki, jumlah tenaga kerja, dan penjualan yang dicapai, maka adanya kondisi yang mendukung menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM (Yasa et al., 2017). Selain itu adanya kondisi yang mendukung dimanfaatkan untuk memperkuat variable budaya organisasi mempengaruhi implementasi SAK EMKM. Faktor pendukung lain yakni usaha yang dijalankan pelaku UMKM yaitu dengan membangun suatu budaya organisasi yang baik.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengimplementasian SAK EMKM pada UMKM untuk pelaporan keuangan. Faktor pertama yang

mempengaruhi implementasi SAK EMKM yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan adalah ilmu yang mempelajari wawasan, kemahiran dan kesederhanaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh sekelompok orang melalui pendidikan, pelatihan, atau penelitian (Putra, 2018). Pendidikan merupakan pengalaman belajar yang memiliki program dalam pendidikan formal, nonformal, dan informal. Penelitian oleh (Putra, 2018) menyatakan bila tingkat pendidikan tidak mempengaruhi penerapan SAK EMKM. Bertentangan dengan hasil riset Murina & Rahmawaty (2017) menyatakan jika tingkat pendidikan mempengaruhi pemahaman laporan keuangan. Selaras dengan riset (Kusuma & Lutfiany, 2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi implementasi SAK EMKM di Kota Bogor secara positif dan signifikan. Ini menggambarkan jika tingkat pendidikan yang tinggi akan semakin meningkatkan pemahaman terhadap laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM yaitu pemahaman akuntansi. Sebagai dasar menyusun laporan keuangan perlu adanya pemahaman akuntansi untuk memahami dalam pengimplementasian SAK EMKM. Orang yang mengerti akuntansi adalah orang yang paham akuntansi, orang yang dikatakan mengerti akuntansi adalah orang yang mengetahui bagaimana proses akuntansi menghasilkan laporan keuangan, dan petunjuk serta tidak lupa SAK (Putra, 2018). Penelitian oleh (Dawam, 2018) yang menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak mempengaruhi pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP. Bertentangan dengan hasil riset (Putra, 2018) menyebutkan jika variable pemahaman akuntansi mempengaruhi secara positif implementasi SAK EMKM. Sejalan dengan hasil riset (Pardita et al., 2019) yang

menyebutkan jika variable tingkat pemahaman akuntansi mempengaruhi penerapan SAK EMKM secara positif dan signifikan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi implementasi SAK EMKM yaitu skala usaha. Skala usaha yaitu suatu patokan yang memperlihatkan seberapa besar dan kecilnya organisasi atau perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk mengelola asset, jumlah karyawan dan pendapatan yang diperolehnya selama waktu akuntansi (Yasa et al., 2017). Berdasarkan hasil riset (Budiman et al., 2017) menjelaskan jika ukuran usaha tidak mempengaruhi SAK ETAP. Sesuai dengan hasil riset (Adino, 2019) yang menyebutkan jika skala usaha tidak mempengaruhi SAK EMKM. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari (Suastini et al., 2018) serta (Yasa et al., 2017) yang menyatakan jika ukuran usaha mempengaruhi pemahaman UMKM berdasarkan SAK EMKM.

Faktor terakhir yang mempengaruhi implementasi SAK EMKM adalah budaya organisasi. Sistem nilai yang harus diteliti, diimplementasikan, dan dikembangkan sebagai sistem yang kohesif yang diyakini oleh seluruh anggota organisasi dan dapat dijadikan pedoman bagi perilaku organisasi di masa mendatang guna menggapai tujuan yang diimpikan oleh organisasi disebut sebagai budaya organisasi (Cahyani et al., 2015). Budaya organisasi pada UMKM dapat mempengaruhi hasil kinerja suatu perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian (Aini, 2017) serta (Sururudin, 2017) menyebutkan jika budaya organisasi tidak mempengaruhi implementasi SAK ETAP. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari (Mulyaga, 2016) menyatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi implementasi SAK ETAP secara positif. Budaya organisasi yang baik akan mempengaruhi implementasi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan SAK EMKM ini diharap bermanfaat bagi unit selama masa transisi. Mengubah laporan keuangan tunai menjadi laporan keuangan akuntansi akrual. Untuk mengambil keputusan demi kelangsungan sutau usaha SAK EMKM hadir untuk memberikan keringanan bagi UMKM. Oleh sebab itu SAK EMKM ini seharusnya dapat diterapkan dengan optimal oleh pelaku UMKM. Namun, penerbitan SAK EMKM tersebut belum dilaksanakan secara maksimal oleh UMKM di wilayah Banjar. Hal ini karena sebagian besar UMKM di Wilayah Banjar tidak mengetahui atau memahami keberadaan SAK EMKM dan para anggota UMKM menganggap SAK EMKM sulit dan rumit untuk disiapkan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerapan SAK EMKM ini, maka pengusaha diharapkan memahami standar akuntansi yang berlaku.

Piset ini mengacu dari riset oleh (Dawam, 2018) pada risetnya berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Pelaporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Studi Kasus Pada UMKM Kerajinan Batik di Kecamatan Tanjung Bumi). Kesamaan antara riset ini dengan riset sebelumnya berada pada variable independen tingkat pendidikan serta pemahaman akuntansi. Keterampilan serta pengalaman pelaku UMKM tergantung pada tingkat pendidikan yang mereka ikuti. Tingkat pendidikan pelaku UMKM menentukan pemahaman pelaku UMKM akan pentingnya penerapan SAK EMKM, sedangkan berbedanya temuan ini dengan temua sebelumnya yaitu variable skala usaha dan budaya organisasi yang ditambahkan. Alasan menambah variable skala usaha dan budaya organisasi yaitu skala usaha merupakan suatu patokan yang memperlihatkan seberapa besar dan kecilnya sebuah organisasi sedangkan budaya organisasi merupakan suatu dasar bagi pemilik usaha dan karyawan dalam

merencanakan serta menyusun laporan keuangan. Perbedaan lainnya yaitu peneliti mengganti SAK ETAP dengan SAK EMKM. Alasan peneliti mengganti SAK ETAP dengan SAK EMKM dikarenakan SAK EMKM merupakan SAK baru yang telah disahkan serta SAK EMKM lebih sederhana dari SAK ETAP. Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini menggunakan objek pada UMKM di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek pada UMKM Kerajinan Batik di Kecamatan Tanjung Bumi.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai implementasi SAK EMKM, fenomena yang ada serta penelitian terdahulu yang mana terdapat ketidakkonsistenan hasil pada variable tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, skala usaha dan budaya organisasi. Oleh sebab itu, peneliti ingin menguji kembali variable-variabel tersebut. Berdasarkan uraian di atas mengenai implementasi SAK EMKM, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Skala Usaha dan Budaya Organisasi Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis mengidentifikasi permasalahan berlandaskan uraian latar belakang yaitu seperti berikut:

1. Banyaknya UMKM yang tidak melaporkan laporan keuangan berlandaskan SAK saat ini. Pelaku UMKM kesulitan saat pembuatan laporan keuangan karena rumitnya akuntansi, sehingga pelaku UMKM tidak dengan mudah melengkapi laporan keuangan.

2. Penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM terhambat karena pendidikan pengelola yang rendah.
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman akuntansi serta kurangnya SDM yang mampu mengelola pencatatan keuangan sehingga pelaku UMKM tidak membuat catatan akuntansi yang sesuai SAK namun hanya membuat pencatatan sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh pelaku UMKM.
4. Keterbatasan modal masih terus menjadi kendala dalam mengembangkan sektor UMKM.
5. Perbedaan skala usaha di suatu perusahaan memberikan dampak yang berbeda dalam pengimplementasian SAK EMKM.
6. Perusahaan dengan budaya organisasi yang baik belum tentu memiliki keterampilan pelaporan keuangan berlandaskan SAK EMKM.

1.3 Pembatasan Masalah

Permasalahan yang ada begitu luas berlandaskan identifikasi masalah sehingga riset ini harus membatasi masalah agar sesuai dengan topik. Penelitian ini difokuskan pada “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Skala Usaha dan Budaya Organisasi Terhadap Implementasi SAK EMKM” serta riset ini dilaksanakan pada UMKM yang ada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan tentang situasi, fenomena, dan konsep serta solusi atau tanggapan yang harus dipecahkan melalui penggunaan

ilmu pengetahuan dan alat terkait untuk melakukan penelitian dan refleksi secara mendalam. Rumusan masalah riset ini berlandaskan uraian masalah di atas adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Banjar?
2. Bagaimanakah pengaruh pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Banjar?
3. Bagaimanakah pengaruh skala usaha terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Banjar?
4. Bagaimanakah pengaruh budaya organisasi terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Banjar?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari riset ini berlandaskan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Banjar.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Banjar.
3. Untuk mengetahui pengaruh skala usaha terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Banjar.
4. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Banjar.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berlandaskan tujuan riset di atas, riset ini diharapkan mampu membawa manfaat teoritis dan praktek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan memberikan tambahan wawasan, ilmu dan pengetahuan yang lebih luas khususnya mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, skala usaha serta budaya organisasi terhadap implementasi SAK EMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan riset ini, penulis bisa mengimplementasikan teori yang telah didapatkan saat kuliah mengkaji lebih dalam mengenai kendala yang ada di UMKM dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK yang diterapkan yaitu SAK EMKM.

b. Bagi UMKM

Riset ini diharapkan dapat menjadi gambaran maupun informasi mengenai pembuatan laporan keuangan sesuai dengan SAK yang ditetapkan dalam meningkatkan kemajuan usaha sehingga dapat mencapai tujuan.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Riset ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi, menambah ilmu pengetahuan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha

mengenai implementasi SAK EMKM serta dapat memberikan sumbangan pengembangan teori yang terkait dengan pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, skala usaha serta budaya organisasi terhadap implementasi SAK EMKM.

